

**DARI SAMUDERA UNTUK DUNIA:
PENOMINASIAN ARSIP TSUNAMI SAMUDERA HINDIA
SEBAGAI *MEMORY OF THE WORLD (MoW)* UNESCO**

Adhie Gesit Pambudi, S.Sos, M.A.¹

Abstrak

Pada 2016, Indonesia menominasikan Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai Memory of the World UNESCO. Peristiwa Tsunami Samudera Hindia pada 2004 merupakan salah satu bencana yang terdahsyat dan mematikan di sepanjang sejarah umat manusia. Peristiwa ini terekam dalam Arsip Tsunami Samudera Hindia yang merupakan warisan dokumenter yang memiliki nilai pembelajaran bagi masyarakat dunia tentang bencana, kemanusiaan, dan pengembangan teknologi penanggulangan bencana.

kata kunci: *Arsip Tsunami Samudera Hindia, memory of the world*

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2004, terjadi bencana mega-tsunami yang melanda Samudera Hindia. Tsunami ini dipicu oleh gempa bumi dengan kekuatan 9,15 skala Richter di kedalaman sekitar 30 km di bawah laut yang mengakibatkan gelombang pasang dengan ketinggian mencapai 30 meter (Lavigne, 2009). Hal ini menimbulkan kerusakan secara

masif di berbagai negara seperti Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, India, dan beberapa negara lainnya. Jumlah korban jiwa akibat hempasan tsunami ini mencapai 310.000 orang. Selain itu, bencana ini juga menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan sanak keluarga. Peristiwa ini merupakan salah satu bencana tsunami terdahsyat sepanjang sejarah umat

¹ *Anggota Tim MoW ANRI dalam pengajuan arsip KAA 1955 (2014-2015), arsip KTT GNB 1961-1992 dan arsip Tsunami Samudera Hindia (2016-2017) sebagai Memory of the World UNESCO.*

manusia. Akibat dari bencana ini, dukungan dan bantuan kemudian berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Masyarakat dunia bersatu padu dan bergandeng tangan dalam membantu meringankan penderitaan korban bencana tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah masing-masing negara juga melakukan program rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap daerah yang terkena dampak akibat tsunami di negara mereka yang salah satunya adalah pemerintah Indonesia.

Peristiwa dan kegiatan penanggulangan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascatsunami 2004 terekam dalam Arsip Tsunami Samudera Hindia di berbagai negara yang terkena dampak tsunami. Arsip ini menjadi memori kolektif bagi bangsa-bangsa yang terkena dampak langsung bencana tsunami pada khususnya dan bangsa-bangsa seluruh dunia pada umumnya. Arsip ini tidak hanya berisi informasi mengenai bencana

tersebut, tetapi juga semangat persatuan, solidaritas, kesetiakawanan antarbangsa di dunia. Arsip ini juga menjadi simbol ketabahan, kekuatan dan perjuangan bangsa-bangsa yang terkena dampak Tsunami di wilayah Samudera Hindia. Berangkat dari pentingnya keberadaan arsip Tsunami Samudera Hindia bagi masyarakat dunia, pemerintah Indonesia melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menominasikan arsip tersebut sebagai memori dunia dalam program *Memory of the World (MoW)* yang diselenggarakan oleh *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* pada periode 2016-2017.

Dalam dunia komunitas kearsipan Indonesia, penominasian arsip sebagai warisan dokumenter sebagai *MoW* belum menjadi perhatian utama. Demikian pula dengan penominasian Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai

MoW pada periode 2016 - 2017. Salah satu penyebabnya adalah masih minimnya pengetahuan komunitas kearsipan Indonesia tentang program *MoW* UNESCO. Hal ini disebabkan karena buku, artikel, ataupun tulisan kearsipan yang membahas tentang seluk beluk arsip sebagai *MoW* masih sangat terbatas.

Sebagai salah satu negara anggota UNESCO, Indonesia sebenarnya telah melakukan penominasian sebuah warisan dokumenter sebagai *MoW*. Pada tahun 2003, Indonesia memiliki andil dalam pengajuan arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* sebagai *MoW* yang dilakukan melalui *Joint Nomination* dengan negara Belanda sebagai pemrakarsa utama. Pada tahun 2011, warisan dokumenter Indonesia lainnya yaitu manuskrip La Galigo kembali menjadi *MoW* yang disusul dengan manuskrip Babad Diponegoro dan Kitab Negara Kertagama pada tahun 2013. Namun, ketiga warisan

dokumenter terakhir bukan merupakan khazanah arsip. Baru pada tahun 2015, arsip Konferensi Asia Afrika 1955 kembali mewakili warisan dokumenter Indonesia yang menjadi *MoW* dalam bentuk arsip.

Meskipun Indonesia memiliki pengalaman dalam pengajuan warisan dokumenter sebagai *MoW*, proses pengajuan setiap nominasi memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena karakteristik informasi dan fisik warisan dokumenter yang dinominasikan memiliki perbedaan satu sama lain. Hal tersebut menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas khususnya terkait dengan proses penominasian Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Program *MoW* dan bagaimana keterlibatan Indonesia di

dalamnya?

2. Bagaimana proses pengajuan Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai warisan dokumenter menjadi *MoW*?

B. Metodologi

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini merupakan penelitian sosial dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami makna serta sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Sumatri, 2005). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data. Teknik yang pertama adalah observasi partisipan yaitu penelitian dilakukan melalui observasi langsung dengan keterlibatan peneliti pada proses pengajuan Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW* UNESCO sebagai bagian dari Tim

MoW Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sementara itu, teknik yang kedua adalah studi pustaka yang dilakukan melalui studi terhadap sumber primer seperti arsip dan sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

C. Kerangka Teori

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teori sebagai dasar dalam rangka menyusun kerangka pemikiran penulisan yang antara lain:

1. Definisi arsip

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (ANRI, 2009).

Menurut Pearce-Moses dalam *A Glossary of Archival and Records Terminology*, arsip memiliki konsepsi yang beraneka ragam. Definisi arsip dapat merujuk kepada (1) dokumen/fisik arsip; (2) unit kerja dalam sebuah organisasi yang melaksanakan kegiatan kearsipan; (3) organisasi yang melaksanakan fungsi kearsipan; (4) profesi dalam bidang kearsipan; (5) bangunan penyimpanan arsip; atau (6) koleksi publikasi ilmiah (Pearce-Moses, 2005).

Menurut UNESCO, pengertian dokumen dalam konteks warisan dokumenter adalah sebagai berikut: *“document is that which documents” or “records” something by deliberate intellectual intent*” yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang

mendokumentasikan atau merekam suatu hal dengan tujuan intelektual tertentu secara disengaja (UNESCO, 2002).

2. Arsip sebagai Memori

Arsip tidak hanya berperan sebagai sumber penulisan sejarah, tetapi juga memori kolektif. Dalam keterbatasan kapasitas ingatan yang dimiliki oleh manusia, arsip memiliki peran sebagai pengingat masa lalu tentang pengalaman, persepsi, narasi, dan cerita kehidupan (Cook, 2002). Konsep memori kolektif muncul sebuah memori menjadi sesuatu tidak lagi dimiliki individu melainkan sekelompok orang atau sebuah bangsa. Memori kolektif ini berkembang dalam lingkup keluarga, masyarakat, sistem pendidikan dan media massa (Nannelli, 2009). Arsip juga berfungsi sebagai alat untuk merekonstruksi memori yang telah hilang atau dikaburkan (Josias, 2011).

3. Arsip sebagai Warisan Budaya

Arsip juga memiliki fungsi sebagai warisan budaya khususnya dalam bentuk dokumenter (*documentary heritage*). Hal ini mengacu pada nilai-nilai kebudayaan yang terkandung dalam arsip. Oleh karena itu, arsip harus diwariskan dari satu generasi ke generasi penerusnya di masa depan (Ketelaar, 2007). Arsip juga merupakan bagian penting dari warisan budaya sebuah negara yang harus dijamin aksesibilitasnya (Fredriksson, 2003). Oleh sebab itu, Peran lembaga kearsipan menjadi sangat penting sebagai lembaga pelestari warisan budaya bangsa seperti halnya institusi warisan budaya lainnya seperti museum dan perpustakaan (Kirchhoff, 2008).

D. PEMBAHASAN

1. Program *MoW* UNESCO

Pada tahun 1992, UNESCO meluncurkan program *MoW*

sebagai bagian dari upaya perlindungan warisan budaya yang dimiliki masyarakat dunia. *MoW* adalah dokumentasi dari memori kolektif bangsa-bangsa di dunia (warisan dokumenter) yang merepresentasikan warisan budaya dunia. *MoW* juga menggambarkan evolusi pemikiran, penemuan, dan pencapaian umat manusia (UNESCO, 2002). Pelaksanaan program *MoW* diharapkan dapat menghindarkan dunia dari sindrom amnesia kolektif yang disebabkan karena hilangnya warisan dokumenter (Royan, 2011).

Visi dari program *MoW* adalah bahwa warisan dokumenter dunia merupakan milik bersama yang harus dilestarikan dan dilindungi sepenuhnya untuk semua dan harus dapat senantiasa diakses oleh semua tanpa halangan karena pertimbangan pengakuan terhadap nilai-nilai dan praktik-praktik budaya. Sedangkan misi dari program *MoW* antara lain adalah memfasilitasi preservasi warisan

dokumenter dunia dengan teknik-teknik yang paling sesuai; menciptakan akses universal terhadap warisan dokumenter; dan meningkatkan kesadaran dunia terhadap keberadaan dan arti penting dari warisan dokumenter (UNESCO, 2016).

Program *MoW* diluncurkan sebagai respon terhadap ancaman kerusakan ataupun kemusnahan bagi warisan dokumenter yang ada di seluruh penjuru dunia yang disebabkan oleh faktor alamiah (*natural causes*) seperti suhu, kelembaban serta bencana alam (Russell, 2005). Selain itu, program *MoW* juga memandang bahwa faktor manusia merupakan ancaman serius bagi warisan dokumenter dunia akibat perang. Hingga saat ini, warisan dokumenter yang hilang atau rusak karena perang tak terhitung banyaknya (UNESCO, 1996).

Pencantuman sebuah warsian dokumenter dalam Registrasi *MoW* Internasional merupakan sebuah pengakuan terhadap

warisan yang memiliki signifikansi dunia sekaligus menjadi sumber sejarah dan warisan budaya yang dapat diakses oleh masyarakat dunia. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah suatu negara dan institusinya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap warisan dunia serta menciptakan kebanggaan dan prestasi bagi sebuah bangsa (Boston, 2005).

Program *MoW* dilaksanakan oleh bidang *Information and Communication* UNESCO yang dikepalai oleh seorang *Assistant Director-General* yang berkedudukan di UNESCO *Head Quarter*, Paris. Sementara itu, Penyelenggaraan program *MoW* di Indonesia dilakukan melalui Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang berkedudukan di Jakarta. Seluruh pengajuan warisan dokumenter di Indonesia sebagai *MoW* dilakukan oleh KNIU (KNIU, 2016).

Penyelenggaraan program *MoW* melibatkan para ahli dari berbagai bidang, unsur pemerintah, praktisi, dan masyarakat secara umum yang dilandasi dengan komitmen dan itikad untuk melestarikan warisan dokumenter dunia (Sabater, 2013). Lingkup program *MoW* sangat luas dan melibatkan berbagai mitra dari mulai pelajar, ilmuwan, dan masyarakat umum hingga pemilik, penyedia, dan produser informasi dan lain-lain (Abid, 1995).

Program *MoW* dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu Internasional, Regional dan Nasional. Pada level internasional, organisasi tertinggi dalam program UNESCO adalah *International Advisory Committee* (IAC) yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan program *MoW* secara menyeluruh (Abid, 2011). IAC mempunyai fungsi untuk menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan seluruh program *MoW*, melakukan monitoring terhadap perkembangan program

secara global melalui pelaporan sekaligus memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab organ-organ lain dalam struktur program *MoW*. IAC bertanggung jawab untuk menyetujui pencantuman atau penghapusan terhadap item dalam *International MoW Register* (UNESCO, 2002). Dalam menjalankan tugasnya, IAC didukung oleh Sekretariat *MoW* yang merupakan bagian dari Divisi Informasi Masyarakat (*Information Society Division*) UNESCO yang bertugas untuk memberikan layanan dukungan kepada IAC dan Sub-komite yang ada di bawahnya termasuk pengelolaan *MoW Register*, melakukan pengelolaan anggaran dan dana *MoW*, dan melaksanakan berbagai tugas lain yang diberikan oleh IAC. Segala bentuk komunikasi yang berkaitan dengan *MoW* dilakukan melalui Sekretariat ini.

Produk utama dari program *MoW* adalah Registrasi *MoW*

Internasional berisi seluruh warisan dokumenter dunia yang memenuhi kriteria seleksi, disetujui pencantumannya oleh IAC, dan disahkan oleh Direktur Jenderal UNESCO. Daftar ini diperbarui dan dipublikasikan oleh Sekretariat *MoW*. Registrasi Internasional *MoW* dapat diakses secara dalam jaringan (*online*) melalui laman UNESCO Mo. Setiap *item* warisan dokumenter terdapat ringkasan informasi dan gambar/foto. Jika sebuah *item* telah didigitalisasi dan dapat diakses dalam jaringan, akan terdapat tautan pada *item* tersebut (UNESCO, 2002). Pencantuman warisan dokumenter dalam Registrasi *MoW* Internasional merupakan sebuah pengakuan terhadap warisan dokumenter yang memiliki signifikansi dunia sekaligus menjadi sumber sejarah dan warisan budaya yang dapat diakses oleh masyarakat dunia. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah suatu negara dan institusinya memiliki kepedulian

yang tinggi terhadap warisan dunia serta menciptakan kebanggaan dan prestasi bagi sebuah bangsa (Boston, 2005).

Pada level regional, program *MoW* dilaksanakan Komite *MoW* Regional (*MoW Regional Committee*) yang merupakan organisasi kerjasama antara dua negara atau lebih yang dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan program *MoW*. Komite *MoW* Regional juga berperan menjembatani IAC dan Komite *MoW* Nasional (Harvey. 2007). Salah satu fungsi Komite *MoW* Regional adalah mengelola Registrasi *MoW* Regional (UNESCO, 2002). Salah satu contoh organisasi ini adalah Komite *MoW* Regional Asia-Pasifik (*Asia/Pacific Regional Committee for the Memory of the World Program*) atau lebih dikenal dengan MOWCAP yang dibentuk pada 1998 di Beijing, China (UNESCO, 2015). MOWCAP juga bertugas untuk melakukan penilaian nominasi Registrasi

MOW Asia/Pasifik dan memberikan rekomendasi pada pencantuman dan penolakan terhadap penominasian warisan dokumenter (MOWCAP, 2005). Komite regional juga memiliki daftar registrasi *MoW* regional. Pada umumnya daftar ini dapat diakses melalui laman resmi milik Komite *MoW* Regional (MOWCAP, Tanpa Tahun). Selain MOWCAP, terdapat Komite *MoW* Regional di wilayah lainnya. Untuk wilayah Amerika Selatan dan Karibia didirikan MOWLAC (*Memory of the World Regional Committee for Latin America and the Caribbean*) (Watson, 2008). Sementara itu, Afrika memiliki ARCMOW (*African Regional Committee for Memory of the World*) yang dibentuk pada Januari 2008 di Tshwane, Afrika Selatan (UNESCO, 2008).

Pada level nasional, program *MoW* dilaksanakan oleh Komite *MoW* Nasional (*National Committee*) merupakan kepanjangan tangan IAC dan

Komite *MoW* Regional di level nasional (Harvey, 2007). Pembentukan organisasi ini adalah salah satu langkah strategis karena keberhasilan program *MoW* menuntut adanya perspektif lokal (Springer, 2008). Komite *MoW* Nasional adalah entitas otonom dengan peraturan, struktur organisasi, dan keanggotaan yang diatur oleh mereka sendiri (UNESCO, 2012). Salah satu contoh Komite *MoW* Nasional adalah *Australian Memory of the World National Committee* (AMW) yang dimiliki oleh Australia dan dibentuk pada tahun 2000 (Harvey, 2007). Di Indonesia, keberadaan Komite *MoW* Nasional dimulai sejak 2005 yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Komite Nasional *MoW* Indonesia mengajukan usulan Registrasi *MoW* di level internasional, regional, dan nasional (LIPI, 2008).

2. *Joint Nomination* Arsip Tsunami Samudera Hindia

Pada awal tahun 2016, ANRI memprakarsai penominasian dua khazanah arsip sebagai MoW yang salah satunya adalah Arsip Tsunami Samudera Hindia. Penominasian ini dilakukan melalui metode *Joint Nomination* dengan negara-negara yang memiliki khazanah Arsip Tsunami Samudera Hindia seperti Sri Lanka, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Pengajuan nominasi melalui *joint nomination* merupakan format yang sangat didukung oleh UNESCO karena hal ini sesuai dengan tujuan UNESCO untuk menyebarluaskan pengetahuan dan membangun hubungan kerjasama antar komunitas dan negara (Cummins, 2008).

Pada awal tahun 2016, ANRI melakukan komunikasi lembaga kearsipan tingkat pusat di negara-negara yang terkena dampak tsunami dalam rangka permohonan dukungan *joint nomination* Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW*.

Namun demikian, ternyata tidak semua lembaga kearsipan tersebut memiliki Arsip Tsunami Samudera Hindia dalam khazanah mereka. Sebagian besar lembaga kearsipan ini menyatakan bahwa Arsip Tsunami Samudera Hindia yang ada di negara mereka masih berada di pencipta arsip (*creating agencies*).

Sri Lanka merupakan salah satu negara yang menyatakan dukungannya terhadap *joint nomination* Arsip Tsunami Samudera Hindia. Melalui *Department of National Archives of Sri Lanka* (SLNA), negara ini memberikan komitmen dukungan penominasian Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW* yang dituangkan dalam bentuk tanda tangan Direktur Jenderal SLNA, Dr. Saroja Wettasinghe dalam formulir nominasi yang dikirim ke UNESCO. Lebih lanjut, SLNA juga memberikan informasi tentang Arsip Tsunami Samudera

Hindia yang mereka miliki. Selain Sri Lanka, Malaysia merupakan salah satu negara yang juga memberikan dukungan *joint nomination* Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW* melalui Arkib Negara Malaysia. Dukungan ini merupakan hasil dari pertemuan Kepala Pengarah (*Director General*) Arkib Negara Malaysia, Azemi bin Abdul Aziz dengan Kepala ANRI, Mustari Irawan, di Seoul, Korea Selatan pada September 2016. Hingga artikel ini ditulis, ANRI masih melakukan komunikasi intensif dengan Malaysia dan Thailand terkait dengan *joint nomination* Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW* dengan kedua negara ini.

Selain dengan negara lain, ANRI juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Aceh melalui Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah menandatangani formulir nominasi Arsip Tsunami

Samudera Hindia sebagai *MoW* sebagai bukti dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Aceh. Di samping itu, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh juga memberikan dukungan penuh dengan melakukan pendataan dan penyelamatan Arsip Tsunami Samudera Hindia yang ada di Provinsi Aceh. Penominasian Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW* juga mendapat dukungan penuh dari KNIU dan Komite *MoW* Indonesia. Hal ini dapat memberikan nilai lebih dalam proses penilaian (UNESCO, 2012).

3. Khazanah Arsip Tsunami Samudera Hindia

Arsip Tsunami Samudera Hindia merupakan rekaman peristiwa dan kegiatan penanggulangan bencana, serta rekonstruksi dan rehabilitasi pasca Tsunami 2004. Pencipta Arsip Tsunami Samudera Hindia terdiri dari Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Perorangan yang diserahkan

ke lembaga kearsipan sebagai lembaga pelestari memori kolektif dan warisan dokumenter.

ANRI adalah lembaga kearsipan Indonesia di tingkat pusat yang memiliki Arsip Tsunami Samudera Hindia yang terdiri dari 9.308 Meter Linier arsip tekstual, 466 lembar arsip foto, 52 kaset arsip audio, 1.206 keeping CD/DVD, dan 13 buah video magnetik. Arsip ini berasal dari kementerian, lembaga, dan perusahaan yang berisi informasi peristiwa Tsunami 2004 khususnya yang melanda wilayah Aceh dan Nias. Selain itu, juga memuat informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak Tsunami di berbagai sektor seperti keagamaan, pembangunan sosial, kebudayaan, infrastruktur, lingkungan, pemeliharaan, aktivitas operasional, pengembangan ekonomi dan bisnis,

pendayagunaan peran perempuan, serta perumahan dan pemukiman. Dalam melakukan pengelolaan Arsip Tsunami Samudera Hindia, ANRI membentuk Balai Arsip Tsunami Aceh (BATA) yang berkedudukan di Banda Aceh. Saat ini, BATA memiliki depo penyimpanan arsip yang dikelola sesuai dengan standar internasional.

Arsip Tsunami Samudera Hindia di ANRI berasal dari berbagai pencipta arsip seperti kementerian, lembaga, dan perusahaan. Adapun pencipta arsip ini antara lain adalah:

a. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nangroe Aceh Darussalam – Nias (BRR NAD-NIAS).

Lembaga ini didirikan pada tahun 2005 oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Lembaga ini dibentuk dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana Tsunami 2004. Pada 2009, lembaga ini dibubarkan oleh Pemerintah Pusat seiring dengan selesainya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-NIAS. Arsip BRR NAD-NIAS kemudian diserahkan ke ANRI dan dikelola oleh Balai Arsip Tsunami Aceh.

b. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Pada tahun 2004 - 2005, ANRI melakukan peliputan peristiwa tsunami di wilayah Aceh dalam rangka melakukan penyelenggaraan dokumentasi arsip kenegaraan. Kegiatan ini

menghasilkan arsip foto yang berisi informasi tentang peristiwa tsunami, kegiatan tanggap darurat, dan penyelamatan arsip di wilayah bencana. Arsip tersebut kemudian menjadi khazanah arsip statis ANRI.

c. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI)

Pada bulan Februari 2006, Kemensetneg RI menyerahkan arsip tentang Tsunami Samudera Hindia ke ANRI yang salah satunya berisi informasi tentang penyelenggaraan *Tsunami Summit* pada Januari 2005 yang membahas tentang langkah-langkah penanggulangan bencana di level internasional. Secara fungsi, Kemensetneg RI adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan dukungan teknis, administratif, dan analitis

kepada Presiden dan Wakil Presiden RI dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

d. Metro TV (PT Media Televisi Indonesia)

Salah satu perusahaan televisi yang menciptakan arsip Tsunami 2004 khususnya dalam bentuk audiovisual adalah Metro TV. Stasiun televisi ini secara aktif melakukan peliputan peristiwa Tsunami 2004 di wilayah yang terkena dampak bencana. Pada April 2016, Metro TV menyerahkan arsip penyiaran terkait Tsunami Samudera Hindia ke ANRI yang terdiri dari rekaman siaran berita dan video amatir tentang peristiwa tsunami 2004.

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh memiliki Arsip Tsunami Samudera Hindia yang terdiri dari 1.402 lembar

foto dan 21 video yang berasal dari perusahaan televisi pemerintah dan swasta, pemerintah provinsi Aceh, serta perorangan. Arsip ini sebagian besar berisi informasi tentang peristiwa terjadinya tsunami dan kegiatan tanggap darurat yang dilakukan pasca terjadinya bencana yang melibatkan pemerintah dan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri.

Arsip Tsunami Samudera Hindia di Pemerintah Provinsi Aceh berasal dari berbagai pencipta arsip seperti pemerintah daerah dan perusahaan. Adapun pencipta arsip ini antara lain adalah:

1) Pemerintah Provinsi Aceh

Sebagai pemerintah daerah yang wilayahnya terkena dampak Tsunami secara langsung, Pemerintah Provinsi Aceh memiliki banyak arsip

penting terkait Tsunami Samudera Hindia. Salah satu unit kerja yang menciptakan arsip ini adalah Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. Biro ini mendokumentasikan peristiwa Tsunami Samudera Hindia di wilayah Aceh. Arsip hasil kegiatan Biro ini kemudian diserahkan ke Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh secara berkala sejak 2010. Selain itu, satuan kerja lain di Pemerintah Provinsi Aceh yang menciptakan arsip Tsunami 2004 adalah Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yang melakukan kegiatan wawancara sejarah lisan dengan tokoh-tokoh penting di Aceh yang menjadi saksi peristiwa tsunami melalui bekerjasama dengan ANRI.

2) Televisi Republik Indonesia Aceh (TVRI Aceh)

Perusahaan pertelevisian lain yang memiliki arsip tsunami 2004 adalah TVRI Aceh. Perusahaan yang merupakan cabang dari TVRI pusat ini memiliki koleksi video khususnya tentang peristiwa dan kegiatan tanggap darurat tsunami 2004 di daerah Aceh dan Nias.

Arsip Tsunami Samudera Hindia yang dinominasikan sebagai MoW yang berada di Sri Lanka merupakan khazanah arsip SLNA. Arsip ini terdiri dari arsip tekstual dari *Presidential Commission of Inquiry into the National Disaster Tsunami*, video rekaman peristiwa tsunami milik SLNA,

dan koleksi arsip foto tsunami milik perorangan. Seiring dengan proses komunikasi dengan Malaysia dan Thailand, Arsip Tsunami Samudera Hindia akan mengalami penambahan dari sisi kuantitas pencipta arsip dan jumlah arsip.

4. Signifikansi Dunia Arsip Tsunami Samudera Hindia

Arsip Tsunami Samudera Hindia memiliki keunikan dari sisi konten dan konteks. Arsip ini memiliki nilai tinggi dalam perjalanan sejarah dunia karena berisi informasi tentang salah satu bencana tsunami yang paling besar dan mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa ini mengundang simpati dari masyarakat dunia untuk memberikan dukungan dan bantuan ke wilayah pascabencana. Berbagai negara mengirimkan petugas kesehatan, militer, dan relawan ke area yang terkena dampak tsunami. Selain itu, bantuan dana dan makan juga berdatangan dari berbagai

penjuru dunia.

Arsip Tsunami Samudera Hindia tidak hanya menceritakan peristiwa tsunami 2004, tetapi juga perjuangan pemulihan kehidupan pasca tsunami melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi. Dengan demikian, masyarakat dunia dapat belajar dari Arsip Tsunami Samudera Hindia tentang metode untuk menghadapi bencana tsunami di masa datang. Peristiwa tsunami 2004 mendorong pembuatan sistem peringatan dini tsunami yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir terhadap resiko bencana untuk mengurangi kerugian dan kehilangan yang akan terjadi ketika bencana tsunami datang. Oleh karena itu, Arsip Tsunami Samudera Hindia menjadi salah satu sumber primer dalam pengembangan teknologi kebencanaan khususnya terkait tsunami.

5. Pengajuan dan Penilaian Arsip Tsunami Samudera Hindia

sebagai MoW

Dalam pengajuan Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai MoW, ANRI melakukan koordinasi dengan Komite MoW Indonesia dan KNIU. Pada tahun 2016, Komite *MoW* Indonesia mengadakan berbagai pertemuan dengan ANRI dan lembaga lainnya yang juga mengajukan warisan dokumenter Indonesia sebagai *MoW*. Pembahasan kelayakan Arsip Tsunami Samudera Hindia untuk dinominasikan sebagai *MoW* dilakukan dengan melibatkan para pakar *MoW* dari berbagai disiplin keilmuan di Indonesia seperti Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, Dr. Mukhlis Paeni, Prof. Taufik Abdullah, dan lain-lain. Formulir Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW* dikirimkan ke Sekretariat *MoW* Paris melalui Komite *MoW* Indonesia dan KNIU pada akhir Mei 2016.

Sekretariat MoW bertanggung jawab terhadap

proses nominasi Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW* dan dapat mencari informasi lebih jauh dari nominator, menjawab pertanyaan, menentukan batas waktu penerimaan nominasi, dan membuat ketentuan lain agar proses penominasian dapat berjalan tepat waktu. Sekretariat *MoW* kemudian menyerahkan nominasi kepada Subkomite Registrasi untuk melakukan proses penilaian lebih lanjut melalui investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan presentasi hasil penilaiannya kepada IAC. Metodologi yang digunakan akan dipublikasikan di laman situs *MoW* termasuk kriteria penilaian yang menjadi prioritas. Penilaian juga dilakukan melalui evaluasi dan masukan para ahli dari berbagai bidang yang dianggap perlu. Sub Komite Registrasi akan meminta masukan para ahli atau lembaga profesional seperti Dewan Kearsipan Internasional atau

International Council on Archives (ICA), Dewan Koordinasi Asosiasi Arsip Audiovisual atau *Coordinating Council of Audiovisual Archive Associations (C AAAA)*, Federasi Asosiasi Perpustakaan Internasional atau *International Federation of Library Associations (IFLA)*, dan Dewan Museum Internasional atau *International Council of Museums (ICOM)* (UNESCO, 2002). Pemberitahuan masuk atau ditolakannya Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW* akan dilakukan pada tahun 2017.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terkait penominasian arsip sebagai *MoW* dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan tema yang dibahas yaitu:

1. Penominasian Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW* merupakan hal yang penting karena arsip ini memiliki signifikansi dunia

sekaligus menjadi sumber sejarah dan warisan budaya yang dapat diakses oleh masyarakat dunia.

2. Pengakuan Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW* menunjukkan bahwa pemerintah suatu negara dan institusinya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap warisan dunia serta menciptakan kebanggaan dan prestasi bagi sebuah bangsa.
3. Penominasian Pengakuan Arsip Tsunami Samudera Hindia sebagai *MoW* harus didukung seluruh bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan peran Indonesia di dalam pelestarian warisan dokumenter dunia.

Dari hasil kesimpulan penelitian di atas dapat ditarik beberapa rekomendasi terkait penominasian arsip sebagai *MoW* yaitu:

1. ANRI sebagai wakil pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan kearsipan

harus selalu konsisten dalam menjalankan program dan kegiatan terkait dengan pengajuan arsip Tsunami sebagai sebagai MoW.

2. Perlu adanya unit kerja khusus di dalam struktur organisasi ANRI yang memiliki fungsi pelaksanaan identifikasi dan pengajuan khazanah arsip sebagai MoW. Hal ini mengingat penominasian arsip sebagai MoW merupakan hal yang strategis

dan pelaksanaannya memerlukan kontrol manajemen dan penganggaran yang berkelanjutan. Unit ini pada nantinya dapat mengidentifikasi arsip yang terdapat di instansi pusat ataupun daerah yang memiliki kriteria untuk diajukan sebagai MoW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, A, Memory of the world - Preseving the Documentary Heritage dalam IFLA Journal 1995 (UK: Sage, 1995)
- _____, Preserving and Sharing Access to Our Documentary Heritage (Paris: UNESCO, 2011)
- ANRI, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Jakarta: ANRI, 2009).
- _____, Nomination Form International Memory of the World Register: Indian Ocean Tsunami Archives (Jakarta: ANRI, 2016)
- Boston, Memory of the World Programme: A debate about its future - Annex D, (Paris: UNESCO, 2005)
- Cook, et.al, Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory dalam Archival Science Archival Science: International Journal on Recorded Information, Vol. 2, 2002 (Netherlands: Springer, 2002), hal. 18.
- Cummins, To Be or Not To Be Remembered?: The greatest challenges for the Memory of the World- Paper Presentation pada 3rd International Memory of the World Conference di Canberra, Australia, 19-22 February 2008. (Canberra: UNESCO, 2008)
- Fredriksson, B, Postmodernistic Archival Science - Rethinking the Methodology of a Science dalam Archival Science Archival Science: International Journal on Recorded Information, Vol. 3, 2003 (Netherlands: Springer, 2003), hal. 183.
- Harvey, R. UNESCO'S Memory of the World Programme dalam LIBRARY TRENDS, Vol. 56, No. 1, Summer 2007 "Preserving Cultural Heritage," (USA: John Hopkins University Press, 2007)
- Josias, A, Toward an Understanding of Archives as a Feature of Collective Memory dalam Archival Science Archival Science: International Journal on Recorded Information, Vol. 11, 2011 (Netherlands: Springer, 2011)
- Ketelaar, E, Muniments and Monuments: the Dawn of Archives as Cultural Patrimony dalam Archival Science Archival Science: International Journal on Recorded Information, Vol. 7, 2007 (Netherlands: Springer,

- 2007)
- Kirchhoff, T, Archives, Libraries, Museums and the Spell of Ubiquitous Knowledge dalam Archival Science Archival Science: International Journal on Recorded Information, Vol. 8, 2008 (Netherlands: Springer, 2008)
- KNIU, ACHIEVEMENT - Booklet 2016 (KNIU, 2016)
- _____, UNESCO Program 2016: Executive Summary (Indonesia: KNIU, 2016)
- Lavigne, dkk, Reconstruction of Tsunami Inland Propagation on December 26, 2004 in Banda Aceh, Indonesia, through Field Investigations dalam Pure and Applied Geophysics Vol. 166 Th. 2009 (Basel: Birkha"user Verlag, 2009)
- LIPI, Tugas dan wewenang Komite Memory of the World Indonesia (Jakarta: LIPI, 2008)
- MOWCAP, MOWCAP Register Subcommittee Rules of Procedure (Manila: MOWCAP, 2005)
- _____, MOWCAP-General Guidelines (Hongkong: MOWCAP, tanpa tahun)
- Nannelli, E, Memory, Records, History: the Records of the Commission for Reception, Truth, and Reconciliation in Timor-Leste dalam Archival Science Archival Science: International Journal on Recorded Information, Vol. 9, 2009 (Netherlands: Springer, 2009)
- Pearce-Moses, R. A Glossary of Archival and Records Terminology (USA: The Society of American Archivist, 2005)
- Royan, B, Saving Fading Heritage: the Coordinating Council of Audiovisual Archives Associations dalam Alexandria Vol. 21, No. 3, 2011 (UK: Sage, 2011)
- Russell, R, UNESCO's Memory of the World Programme Paper dipresentasikan pada Deadly Direction Conference di Canberra pada 2-3 Agustus 2005 (Australia: ATSLIRN, 2005)
- Sabater, A, UNESCO's Memory of the World Programme and Heritage Protection Conventions (Paris: French National Commission for UNESCO, 2013)
- Springer, J, The Memory of the World Programme: Its aims and architectures – Paper Presentation pada 3rd International Memory of the World Conference di Canberra,

- Australia, 19-22 February 2008. (Canberra: UNESCO, 2008)
- Sumantri, G.R., Memahami Metode Kualitatif dalam Makara: Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005)
- UNESCO, Implementation of UNESCO Memory of the World Programme at National Level: Survey Result (Latvia: UNESCO, 2012)
- _____, International Advisory Committee of the Memory of the World Programme - Rules of Procedure (Paris: UNESCO, Tanpa Tahun)
- _____, Memory of the World Asia-Pacific Programme – Booklet, (Jakarta: UNESCO, 2015)
- _____, Memory of the World Programme: Exploring Means for Further Improvement (Paris: UNESCO, 2016)
- _____, Memory of the World Register Companion (Paris: UNESCO, 2012)
- _____, Memory of the World: General Guidelines (Revised edition 2002) / disusun oleh Ray Edmondson (Paris: UNESCO, 2002)
- _____, Memory of the World: Lost Memory - Libraries and Archives destroyed in the Twentieth Century disusun untuk UNESCO atas nama IFLA oleh Hans van der Hoeven dan atas nama ICA oleh Joan van Albada (Paris : UNESCO, 1996)
- _____, Tshwane Declaration (Afrika Selatan: UNESCO, 2008)
- Watson, MOWLAC: Privileging Memory in Latin American and the Caribbean dipresentasikan pada 3rd International Memory of the World Conference di Canberra, Australia pada Februari 2008, (Canberra: UNESCO, 2008)